

Abstrak

Pada dasarnya setiap dana pensiun memiliki peraturan yang berbeda ketentuannya satu sama lain. Namun isi dari peraturan yang dibuat oleh tiap-tiap dana pensiun tersebut harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun dan juga harus terkait dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut sebagai payung hukum dalam pengelolaan dana pensiun swasta di Indonesia. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai kontribusi perusahaan dalam program dana pensiun yang tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan pesangon pada saat pensiun dan putusan pengadilan PHI yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dari perusahaan pemberi kerja dan dalam kontribusi perusahaan dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan pesangon pada saat pensiun dan hal mengenai putusan perkara No. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST majelis hakim sudah melakukan putusan yang sudah sesuai yaitu bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.